



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE- **2** MEI 2025



KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE UNIT KERJA ESELON I



KERJA SAMA
KEMENTERIAN HUKUM



HARMONISASI
PERATURAN DAERAH

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



Divisi PPPH Dorong Optimalisasi Pembangunan Hukum: Tanggapi Draft Renstra Kementerian Hukum 2025-2029



Banjarmasin, Humas_Info – Jumat (09/05), Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan menggelar rapat internal dalam rangka Penyusunan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draft Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029. Bertempat di Ruang Rapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana.

Rapat yang dihadiri oleh para koordinator fungsional—meliputi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, hingga Koordinator Strategi Kebijakan—berjalan dinamis dan konstruktif. Dalam forum ini, para peserta mengangkat berbagai isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kalimantan Selatan, serta menyampaikan beragam gagasan untuk memperkuat arah pembangunan hukum nasional ke depan.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini dinilai perlu lebih diperluas jangkauannya agar mampu menjangkau lapisan masyarakat di daerah. Selain itu, penguatan program desa dan kelurahan sadar hukum juga menjadi sorotan penting, karena dinilai sebagai fondasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dari tingkat lokal.

Tak kalah penting, peserta rapat juga menyoroti perlunya pembentukan pos bantuan hukum yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan warga yang belum terjangkau layanan hukum. Upaya peningkatan kapasitas fungsional Analis Hukum pun didorong, guna memastikan kualitas telaahan kebijakan dan pendampingan regulasi yang lebih tajam dan solutif.

Dalam hal kebijakan, Divisi PPPH mendorong strategi yang lebih berdampak, efisien, dan berkeadilan—dengan mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Kesadaran pemerintah daerah dan DPRD terhadap pentingnya pemahaman regulasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian khusus, mengingat masih ditemukan kesenjangan pemahaman dalam implementasi di daerah.

“Masukan ini bukan sekadar catatan administratif, tetapi merupakan refleksi nyata dari tantangan hukum di daerah. Kami berharap agar usulan ini dapat menjadi bagian integral dalam penyusunan Renstra Kemenkum 2025–2029 demi pembangunan hukum yang lebih responsif dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Anton Edward Wardhana dalam arahannya.

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan lancar, penuh semangat kolaboratif, dan menunjukkan komitmen kuat jajaran Divisi PPPH dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional dan berdampak bagi masyarakat.





Kementerian Hukum Jalin Sinergi Antara Kementerian/Lembaga, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Virtual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan berbagai Kementerian/Lembaga secara virtual, yang diselenggarakan pada Rabu, (14/05) dengan kegiatan berpusat di Graha Pengayoman.

Kegiatan penting ini menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi jangka panjang antar instansi pemerintah guna memperkuat sinergi di berbagai bidang, sekaligus mendukung percepatan tercapainya visi besar nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Turut hadir dari Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan tersebut, yaitu Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Tim Kerja Humas dan TI Kanwil Kemenkum Kalsel. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah konkret dalam membangun kerja sama berkelanjutan.

"Ini bukan sekadar penandatanganan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama antar Kementerian dan Lembaga untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan secara resmi nota kesepahaman oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bersama 20 mitra dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan optimisme atas kolaborasi ini. “Saya yakin, melalui kerja sama ini, kita dapat bersama-sama mendorong Indonesia menuju kemajuan yang kita cita-citakan pada tahun 2045,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah melakukan transformasi digital sebagai upaya mempermudah pelayanan publik yang semakin modern dan efisien. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman.

”Penandatanganan nota kesepahaman ini memperkuat komitmen kami di daerah untuk terus bersinergi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, serta mendukung arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan berbagai instansi pemerintah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta percepatan transformasi layanan publik di bidang hukum, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.



Dorong Regulasi Berkualitas, Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Tiga Ranperda Pemkab Tanah Laut



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (14/5/25). Rapat ini membahas harmonisasi terhadap tiga Ranperda yang diinisiasi oleh Pemkab Tanah Laut.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjahtul Mardiah, didampingi para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut. Hadir pula perwakilan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, setiap SKPD Pemrakarsa Ranperda memberikan paparan awal mengenai substansi dan latar belakang penyusunan masing-masing Ranperda. Selanjutnya, para Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan masukan dan perbaikan teknis normatif guna menyempurnakan substansi Ranperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tiga Ranperda yang diharmonisasikan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Ranperda ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karenanya dirasa perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ranperda ini disusun mengingat dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Ranperda ini disusun dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Laut dan terpenuhinya hak konstitusional warga masyarakat untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, maka pelayanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan terhadap perkara hukum yang sedang atau masih berproses baik ditingkat penyidikan, penyelidikan dan/atau penuntutan tetapi pelayanan bantuan hukum dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan supervisi langsung kepada warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Selaku Pimpinan Rapat, Bahjahtul Mardiah menyampaikan bahwa proses harmonisasi sangat penting untuk memastikan setiap Ranperda telah sesuai dengan asas, hierarki, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. "Harmonisasi merupakan langkah krusial dalam memastikan agar Ranperda yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memiliki kepastian hukum dan kualitas normatif yang tinggi," ungkap Bahjahtul Mardiah.

Sementara itu, Andik Mawardi selaku Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan turut menyampaikan pandangannya mengenai peran penting Biro Hukum Provinsi dalam pembentukan produk hukum daerah. "Biro Hukum Provinsi hadir untuk mendampingi dan memastikan agar pembentukan Perda di tingkat kabupaten/kota tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan sesuai dengan kebijakan nasional," ujar Andik.

Melalui rapat harmonisasi ini, diharapkan ketiga Ranperda yang tengah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Kemenkum Kalsel Dampingi Bapperida Balangan dalam Konsultasi Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum memberikan pendampingan dan konsultasi kekayaan intelektual kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan pada Rabu (14/05/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Dalam konsultasi tersebut, pihak Bapperida Balangan yang dipimpin oleh Kepala Bapperida, H. Rakhmadi Yusni, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam melindungi hasil-hasil kreasi dan inovasi daerah.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Balangan mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual sebanyak 200 inovasi daerah yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Balangan. Salah satu inovasi yang telah dicatatkan dalam kesempatan ini adalah program komputer dengan judul ciptaan “Siap PD (Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah)” yang diajukan oleh Resty Faurina, Kabid Riset dan Inovasi Bapperida Balangan. Bidang Pelayanan KI Kanwil Kalsel juga memberikan penjelasan teknis serta tutorial pencatatan hak cipta secara daring melalui laman dgip.go.id, yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien.

H. Rakhmadi Yusni menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan yang diberikan.

"Selama proses pendampingan, kami dilayani dengan sangat baik, ramah, dan cepat. Proses pencatatan hak cipta hanya memakan waktu 10 menit selama persyaratan telah lengkap. Sertifikat pun langsung terbit secara digital dengan masa perlindungan selama 50 tahun. Kami sangat berterima kasih kepada Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan," ungkapnya.

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melindungi hasil karya dan inovasinya melalui sistem kekayaan intelektual, sebagai bagian dari penguatan ekosistem inovasi dan pembangunan hukum yang inklusif di daerah.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rakor Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Bersama Menteri Hukum RI



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, pada Rabu (14/05).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari serta jajaran JFU dan Helpdesk pada Bidang Pelayanan AHU di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Dalam arahannya, Menteri Hukum RI menekankan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari tindak lanjut atas Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi ini menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang perlu didorong secara masif dan terstruktur.

Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa dalam konteks percepatan ini, notaris tidak memerlukan izin khusus untuk membuat akta pendirian koperasi. Namun, tantangan di lapangan masih ada beberapa kendala yang ditemui. Untuk itu, Menteri Hukum meminta agar Kantor Wilayah berperan aktif dalam berkoordinasi dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar pendampingan musyawarah dapat terlaksana optimal.

“Dalam waktu dekat, akan diluncurkan sebuah aplikasi sebagai alat pemantau aktivasi dan kinerja Kantor Wilayah dalam mendukung program Koperasi Merah Putih ini,” ujar Menteri Hukum RI.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, turut menekankan pentingnya sinergi antara Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan para notaris di daerah dalam menyukseskan program strategis nasional ini. Sesi pengarahan dan diskusi juga dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, yang mendorong seluruh jajaran untuk menjaga komitmen dan meningkatkan koordinasi lintas sektor demi percepatan implementasi koperasi di seluruh desa dan kelurahan.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh Kantor Wilayah dapat segera mengambil langkah konkret dan terukur guna mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.

Dua Pejabat Manajerial Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Secara Daring



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial dalam bidang pengelolaan risiko organisasi, dua pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) yang diselenggarakan secara daring (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ) oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Pelatihan ini digelar pada tanggal 14 hingga 21 Mei 2025 dan diikuti oleh 30 orang pejabat manajerial dari 10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam wilayah kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, peserta yang ditugaskan adalah Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, dan Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini mencakup berbagai materi strategis, mulai dari konsep dasar manajemen risiko sektor publik, penetapan konteks dan identifikasi risiko, hingga evaluasi, penanganan, serta monitoring dan pelaporan manajemen risiko. Semua materi disampaikan oleh narasumber dari Pusdiklatwas BPKP dan dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting dan e-Learning GIA Corpu Pusdiklat BPKP.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur hukum dalam mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik partisipasi pejabatnya dalam kegiatan ini.

“Manajemen risiko adalah fondasi penting dalam tata kelola organisasi modern. Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko secara sistematis di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya secara terpisah.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kapasitas pegawai guna mendukung reformasi birokrasi dan menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas.



Harmonisasi Ranperda dan Ranperbup Tapin, Kemenkum Kalsel Dorong Produk Hukum Berkualitas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Tapin terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Kegiatan ini dilaksanakan di Fugo Hotel Banjarmasin, Rabu (14/5/25).

Rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya didampingi para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tapin Zainal Abidin, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tapin, Taufiqurahman, Kepala Inspektorat Tapin Unda Absori, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin H. Meidy Harris Prayoga, serta unsur perangkat daerah lainnya seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta jajaran Bappelitbang Kabupaten Tapin.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pemrakarsa memaparkan substansi dan latar belakang penyusunan regulasi. Selanjutnya, para perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan dan penyempurnaan dari aspek teknis dan normatif agar Ranperda dan Ranperbup yang disusun sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun Ranperda dan Ranperbup yang diharmonisasikan dalam rapat ini meliputi:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
4. Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

“Rapat harmonisasi ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip legal drafting yang baik serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, Zainal Abidin, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Kami mengapresiasi sinergi yang terjalin selama proses harmonisasi ini. Kehadiran para perancang dari Kanwil Kemenkum Kalsel sangat membantu kami dalam menyempurnakan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian hukum, mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.



Gula Aren Tirawan dan Kayu Manis Loksado Siap Go International, Kemenkum Kalsel Kawal Proses IG



Jakarta, KI_Info – Dalam upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual berbasis potensi lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melakukan koordinasi ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, (14/05/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton E. Wardhana. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pendaftaran indikasi geografis yang telah diajukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan dua permohonan indikasi geografis dari Kalimantan Selatan, yaitu Kayu Manis Loksado yang saat ini telah memasuki tahap pengumuman (publikasi), serta Gula Aren Tirawan Kotabaru yang masih dalam proses pemeriksaan formalitas. Tahapan publikasi ini penting sebagai bentuk transparansi dan membuka ruang keberatan dari masyarakat dalam jangka waktu dua bulan.

DJKI mendorong agar selama masa publikasi, Kanwil dan pemerintah daerah turut aktif memantau serta segera menindaklanjuti jika terdapat kekurangan administratif atau teknis yang perlu diperbaiki.

Selain dua permohonan yang sedang berproses, juga dibahas potensi pengajuan tujuh indikasi geografis lainnya dari Kalimantan Selatan. Untuk itu, sinergi antara Kanwil, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta pemerintah daerah sangat diperlukan guna mendorong percepatan pendaftaran serta perlindungan terhadap produk-produk khas daerah yang memiliki nilai ekonomi dan budaya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis kekayaan intelektual, khususnya melalui perlindungan Indikasi Geografis. (Hmas kemenkum Kalsel, Kontributor: Bidang KI, ed: Eko/Arie)





Dorong Pemahaman dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Sosialisasi di HST



Barabai, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Teknis terkait permohonan Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang digelar oleh Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) di Aula Lantai II Bappelitbangda, Rabu (14/05).

Kegiatan ini diikuti oleh 27 SKPD Kabupaten HST, pelaku usaha UMKM/IKM, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pegiat seni dan budaya lokal. Menghadirkan dua narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, yakni Analis KI Ahli Muda M. Aji Rifani dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Dianor, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta dan kekayaan intelektual lokal.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan secara rinci definisi, jenis, dan manfaat KI, meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, serta Kekayaan Intelektual Komunal. Salah satu sorotan adalah prinsip dasar Hak Cipta yang bersifat otomatis dan memberikan hak moral serta hak ekonomi kepada pencipta.

Kegiatan ini juga menyentuh aspek teknis pendaftaran KI, termasuk mekanisme permohonan Hak Cipta untuk karya tulis, seni, dan musik, serta prosedur Desain Industri sesuai Juklak dan Juknis DJKI. Tidak kalah penting, narasumber menekankan urgensi perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal, seperti Sasirangan dan praktik pengobatan tradisional Batimung yang menjadi kekayaan khas Kalimantan Selatan.

Peserta diberi edukasi tentang mekanisme penegakan hukum KI, termasuk mediasi dan penyidikan atas pelanggaran KI, serta perlindungan dari pemalsuan. Ditekankan pula pentingnya mendaftarkan karya ke DJKI untuk memperoleh kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong perlindungan hukum dan pemanfaatan optimal terhadap kekayaan intelektual lokal demi mendukung pembangunan ekonomi kreatif daerah.



Bangun Hukum Nasional Lewat Kerja Sama Lintas Sektoral



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya mewujudkan pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Kali ini, Kemenkum mengesahkan kerja sama lintas sektoral dengan 20 kementerian dan lembaga pemerintah dalam bentuk nota kesepahaman (NK).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan kerja sama dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Ke-20 kerja sama ini membuka ruang bagi Kemenkum untuk mengintegrasikan pelayanan hukum dengan berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan, hingga pekerjaan umum. “Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Supratman, Rabu (14/5/2025).

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri. Dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik. “Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” tuturnya.

Ia menyebut bangsa Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan, baik di bidang teknologi maupun sosio kultural. Perkembangan ini pun menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia dituntut menjadi adaptif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, lanjut Supratman, penandatanganan NK diharapkan menguatkan landasan kerja sama yang sudah ada, sekaligus mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” tambahnya.

Doktor bidang hukum jebolan Universitas Muslim Indonesia ini mengatakan kolaborasi antar kementerian dan lembaga telah menjadi arahan Presiden Prabowo sejak pembentukan Kabinet Merah Putih. Ia yakin kerja sama yang solid akan mengantar Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Salah satu contoh kolaborasi, sebut Supratman, adalah antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Koperasi yang diberi target oleh Presiden Prabowo untuk membentuk 80.000 koperasi merah putih. “Saya telah meminta Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan akselerasi. Saat ini kami memiliki jalur khusus untuk koperasi merah putih sehingga 1.000 koperasi bisa melakukan pendaftaran bersamaan dalam satu jam. Artinya dalam waktu 1x24 jam itu bisa 24.000 koperasi. Sehingga target 80.000 koperasi bisa diselesaikan dalam waktu empat hari,” jelasnya.

Supratman juga sedang memimpin jajaran Kemenkum untuk melakukan transformasi digital, yang akan memudahkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini telah ada 47 mitra yang melakukan penandatanganan NK guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti Menyambut antusias penandatanganan nota kesepahaman lintas sektoral yang digagas oleh Menteri Hukum merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem hukum nasional.

“Kami menyambut baik kebijakan ini karena akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi integrasi layanan hukum di Kalimantan Selatan. Dengan sinergi bersama lintas sektor, pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan, pelaku usaha, dan komunitas adat dapat dilakukan secara lebih inklusif dan adaptif. Kami di wilayah siap mendukung penuh arahan Bapak Menteri, termasuk mendorong transformasi digital dan percepatan layanan hukum, demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Penjelasan Menteri Hukum tentang Kewarganegaraan Eks TNI yang Jadi Tentara Rusia



Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan eks anggota TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, telah memenuhi syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia lantaran menjadi tentara aktif Rusia.

Supratman menyebutkan bahwa berdasarkan pengecekan pada sistem www.kewarganegaraan.ahu.go.id per 12 Mei 2025, Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. Namun sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang.

Ia menjelaskan status kewarganegaraan seseorang diatur menurut Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 23 huruf d dan e menetapkan bahwa warga negara Indonesia (WNI) kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

"Berdasarkan Undang-undang kita, tidak boleh seorang warga negara Indonesia terlibat atau aktif di militer asing tanpa se-izin Presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka status kewarganegaraannya hilang," kata Supratman di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2025).

Supratman melanjutkan, status kewarganegaraan Satria hilang dengan sendirinya ketika aktif di militer asing tanpa izin Presiden, jika merujuk pada Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Jadi berdasarkan UU 12 tahun 2006 dan PP 2 tahun 2007 maka saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia," tambahnya.

Meski demikian, terang Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Instansi pusat, daerah, ataupun masyarakat harus melaporkan kepada Menteri Hukum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan. Selanjutnya, Menteri Hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud.

Saat ini, Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kubara yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung penuh pernyataan Menteri Hukum yang menegaskan pentingnya penegakan prinsip kedaulatan negara melalui aturan kewarganegaraan.

"Kami memandang hal ini sebagai pengingat bahwa status kewarganegaraan bukan sekadar identitas administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang serius. Bergabungnya seorang WNI dalam militer asing tanpa izin Presiden merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Kami mendukung penuh langkah Kementerian Hukum untuk memastikan proses administrasi kehilangan kewarganegaraan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur, serta siap melakukan pelaporan apabila di daerah kami terdapat kasus serupa," ucapnya.

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Ranperbup Pemkab Tapin Terkait Penghasilan Perangkat Desa dan BPD



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah bersama Pemerintah Kabupaten Tapin. Rapat kali ini membahas dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) terkait penghasilan dan tunjangan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kamis, (15/05/2025).

Rapat harmonisasi ini dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dan melibatkan tim perancang dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari perangkat daerah dari Pemkab Tapin.

Dua Ranperbup yang diharmonisasikan yakni:

pertama, Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2022, yang mengatur penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, staf desa, serta BPD, termasuk pengaturan baru mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Kedua, Ranperbup tentang Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi tindak lanjut dari amanat Pasal 26 ayat (7) Ranperbup sebelumnya. Ranperbup ini merinci ketentuan mengenai tunjangan berbasis beban kerja bagi pimpinan dan anggota BPD, dengan pendanaan bersumber dari pendapatan asli desa atau sumber lain selain dana desa.

Selama rapat, tim harmonisasi memberikan sejumlah masukan substansial maupun redaksional guna memastikan kedua Ranperbup tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memenuhi asas keterpaduan, kejelasan rumusan, serta keefektifan pelaksanaan.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Pemkab Tapin dalam menyusun produk hukum yang adil, tepat sasaran, dan berpihak pada kesejahteraan perangkat desa dan BPD, sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif.



Pelaku Usaha Di Banjarbaru Dibekali Pengetahuan Tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual



Banjarbaru, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) terus menguatkan upaya preventif terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan menasar para pelaku usaha di Banjarbaru. Bertempat di Roemah PeRI Banjarbaru, Rabu (14/05) kegiatan sosialisasi bertajuk “Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Usaha” digelar dengan menghadirkan perwakilan pelaku usaha dari UMKM, sentra KI, serta pusat perbelanjaan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Penegakan Hukum DJKI, Pokja Pencegahan Pelanggaran KI Kanwil Kemenkum Kalsel, serta Help Desk KI. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual seperti merek, desain industri, dan hak cipta.

Para peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai risiko hukum dan kerugian ekonomi jika terbukti melanggar hak KI orang lain. Selain itu, peserta juga diberi edukasi teknis terkait cara pendaftaran KI secara daring, termasuk manfaat menggunakan layanan Sentra KI yang tersedia di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan pentingnya edukasi hukum kepada pelaku usaha agar tidak hanya fokus pada pengembangan produk, tetapi juga memahami aspek perlindungannya secara hukum.

“Kami ingin pelaku usaha lokal tidak hanya produktif, tapi juga cerdas hukum. Perlindungan Kekayaan Intelektual bukan semata urusan legalitas, tetapi bentuk keberanian mengakui hasil karya dan inovasi sendiri. Ini yang terus kami dorong agar pelaku usaha di Kalimantan Selatan naik kelas dan siap bersaing secara sehat di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula sejumlah contoh nyata pelanggaran KI yang pernah ditangani oleh DJKI. Studi kasus tersebut menjadi bahan pembelajaran agar para pelaku usaha makin waspada dan tidak abai terhadap pentingnya legalitas produk atau jasanya.

Kegiatan berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Ke depan, kegiatan serupa akan terus didorong agar semakin banyak pelaku usaha lokal yang sadar hukum dan tertib dalam pemanfaatan Kekayaan Intelektual.



Kemenkum Kalsel Dampingi DJKI Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI ke Pelaku Usaha Banjarbaru



Banjarbaru, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) kembali melakukan aksi nyata dalam mendorong perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Kali ini, kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual digelar di tempat usaha Keen Zhan Ramen dan Ayam Goreng 3 Rasa, Kota Banjarbaru, dengan menghadirkan pemilik usaha, Rahmayina, sebagai peserta utama.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (14/5) siang tersebut, merupakan bentuk sinergi antara Kantor Wilayah dan Direktorat Penegakan Hukum DJKI. Melalui Pokja Pencegahan Pelanggaran KI dan Helpdesk KI, tim gabungan turun langsung memberikan pendampingan dan penyuluhan terkait langkah-langkah strategis mencegah pelanggaran hak atas merek.

Dalam kesempatan tersebut, tim menyampaikan bahwa merek KEENZHAN telah resmi terdaftar di DJKI dengan Nomor Registrasi IDM001312344. Keberadaan data ini menjadi pijakan awal penting dalam melakukan perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki pelaku usaha.

Tim DJKI juga menjelaskan bahwa pendaftaran bukanlah akhir dari proses perlindungan. Diperlukan pemahaman berkelanjutan terhadap langkah-langkah tindak lanjut apabila terjadi indikasi penjiplakan atau klaim merek oleh pihak lain. Dalam hal ini, Kantor Wilayah turut menekankan risiko hukum serta potensi kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran KI.

“Pendaftaran merek memberikan posisi hukum yang kuat bagi pelaku usaha. Namun, kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi ancaman pelanggaran juga penting. Itulah kenapa kegiatan edukatif semacam ini perlu rutin dilaksanakan,” ujar salah satu anggota tim DJKI di lokasi kegiatan.

Pelaku usaha, Rahmayina menyampaikan apresiasinya atas edukasi dan pendampingan yang diberikan. Ia merasa terbantu dalam memahami langkah hukum yang bisa ditempuh apabila usahanya mengalami indikasi pelanggaran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya DJKI dan Kemenkum Kalsel untuk memperkuat perlindungan KI di level UMKM dan pelaku usaha daerah. Ke depan, sinergi ini akan terus diperluas agar semakin banyak pelaku usaha yang terlindungi secara hukum dan memahami pentingnya Kekayaan Intelektual dalam mendukung keberlanjutan bisnis.



Dorong Pembelajaran Kolaboratif, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Launching Aplikasi CoP BPSDM Hukum



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi Community of Practice (CoP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara virtual dengan kegiatan yang berpusat di Auditorium Lt.2 BPSDM Hukum.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Nuryanti Widyastuti serta Tim Kerja Pengelolaan SDM Kanwil Kemenkum Kalsel secara terpisah sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi pembelajaran berbasis digital yang dikembangkan oleh BPSDM Hukum.

Aplikasi Community of Practice (CoP) dikembangkan sebagai platform kolaboratif yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kompetensi para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Platform ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengembangan profesional, serta pembangunan jaringan antar profesional secara virtual dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa CoP merupakan bentuk respons strategis terhadap kebutuhan pembelajaran yang transformatif dan adaptif bagi ASN. Ia menegaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi berkelanjutan tidak hanya bagi ASN di lingkungan Kementerian Hukum, tetapi juga di seluruh tanah air.

Lebih lanjut, Gusti Ayu memaparkan delapan Jabatan Fungsional (JF) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Hukum, yaitu:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan
2. Penyuluh Hukum
3. Analis Hukum
4. Kurator Keperdataan
5. Pemeriksa Merek
6. Pemeriksa Paten
7. Pemeriksa Desain Industri
8. Analis Kekayaan Intelektual

“Melalui CoP, kita membangun budaya pembelajaran bersama yang menekankan pada prinsip saling asah antar rekan sejawat. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan pengalaman bagi ASN,” tuturnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi teknis mengenai penggunaan aplikasi CoP yang akan menjadi sarana utama dalam pelaksanaan pembelajaran mandiri, diskusi, dan kolaborasi antar ASN.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Penelitian Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik Berbasis Data melalui Aplikasi SIPKUMHAM, Laksanakan Koordinasi Ke Bagian Hukum Setda Banjarbaru



Banjarmasin, Humas Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Banjarbaru terkait verifikasi pengumpulan data lapangan terhadap permasalahan hukum dan pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM di wilayah. Kegiatan dilaksanakan oleh Eldy Prasetya selaku Ketua Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum beserta tim. Kedatangan Tim disambut langsung oleh Faisyal Ridha selaku Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarbaru. Kamis, 15/5/2025

Disampaikan oleh Eldy Prasetya dalam kegiatan terkait pemanfaatan SIPKUMHAM sebagai sarana mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring/sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis. Adapun Judul yang akan diangkat yaitu terkait Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

"Sipkumham dibangun dengan inovasi crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring/sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan setiap waktu. Metode ekstraksi informasi untuk melakukan analisa terhadap hasil crawling data yang akan disimpan ke dalam database", papar Eldy.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ridha mengungkapkan terkait publikasi pemberitaan melalui web resmi Pekot Banjarbaru yang sementara ini sudah terintegrasi dengan portal JDIH, untuk itu akan ditindak lanjuti agar dapat masuk kedalam Sipkumham.

"Sejauh ini link/web dari kami sudah terintegrasi dengan portal jdih milik Kemenkum, terkait dengan pemberitaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di daerah kedepan, akan kami kirimkan linknya kepada operator Sipkumham Kanwil Kalsel agar dapat terintegrasi juga dengan aplikasi Sipkumham" Papar Ridha.

Dalam kegiatan, Ketua Tim Kerja juga membahas perihal progres pembangunan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola regulasi di daerah serta mendukung pencapaian target reformasi hukum. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan apresiasi atas pencapaian IRH Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang memperoleh skor 81 dengan kategori baik, dan berharap agar capaian tersebut dapat ditingkatkan pada tahun 2025.

Terkait dengan IRH, Ridha mengungkapkan perkembangan pemenuhan data dukung di Setda Kota Banjarbaru tahun 2025

"Sejauh ini, kami bersama jajaran di Bagian Hukum Setda Banjarbaru telah meninventarisir dan menyiapkan data dukung IRH yang kemudian akan di unggah untuk kelengkapan data dukung", ungkap Ridha.

Menutup kegiatan, Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum membuka ruang koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya apabila ada kendala dalam proses pemenuhan dokumen data dukung IRH, pemanfaatan Aplikasi Sipkumham, dan perihal yang berkaitan dengan tugas fungsi Badan Strategi Kebijakan lainnya.

Harmonisasi Ranperda RPJMD Tabalong 2025-2029, Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitas Pembahasan Substantif



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong yang memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjahtul Mardiah, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Subhan; Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Sumiati; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, Arianto; Inspektur Kabupaten Tabalong, M. Zainal Arifin; serta jajaran Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Turut hadir pula perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, Arianto dalam paparannya menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. "RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, tujuan, sasaran, strategi, hingga kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, dokumen ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah," jelas Arianto.

Bahjahtul Mardiah menegaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan agar setiap rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berpihak kepada kepentingan publik," ujarnya.

Proses harmonisasi berjalan dengan baik, diwarnai dengan pembahasan yang substantif dan kontekstual guna memastikan Ranperda RPJMD menjadi produk hukum yang berkualitas. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel secara aktif memberikan masukan dan perbaikan, baik secara lisan maupun tertulis, terhadap substansi dan struktur norma dalam rancangan tersebut. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Subhan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel untuk melaksanakan proses harmonisasi ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting guna memastikan bahwa Ranperda yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami menyambut baik dukungan dan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam rangka penyempurnaan regulasi daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan," ujar Subhan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Sumiati, turut menyampaikan harapannya agar Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dapat benar-benar menjadi penjabaran yang utuh dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih. Ia menekankan pentingnya penyusunan peraturan daerah yang tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. "Ranperda ini harus mampu menjabarkan secara konkret visi dan misi kepala daerah agar implementasinya tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," ujar Sumiati.

Melalui rapat ini, diharapkan Ranperda RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dapat segera ditetapkan dan menjadi landasan pembangunan daerah yang strategis dan berkesinambungan.

Upaya Indonesia Membangun Hukum yang “Ramah” Investasi Asing



Rusia - Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, menyebutkan iklim investasi sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, bisnis yang bersih akan mendatangkan investor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Wamen yang akrab disapa Prof. Eddy ini mengatakan kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi. Kerangka hukum ini meliputi hukum yang jelas dan tegas melawan pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik untuk sektor publik maupun privat.

“Kerangka hukum yang kokoh adalah pondasi perlindungan investasi. Kita harus memiliki hukum dan lembaga yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Namun hukum di atas kertas saja tidak cukup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan,” katanya dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional di Rusia, Kamis (15/5/2025).

Di Indonesia, jelas Eddy, terdapat setidaknya empat langkah yang telah diambil Indonesia agar menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing. Pertama, Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru memiliki muatan yang menguatkan tanggung jawab korporasi terhadap sistem anti penyuapan.

Kemudian, Kementerian Hukum (Kemenkum) meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dari korporasi. Pendaftaran pemilik manfaat adalah alat yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu korporasi.

“Indonesia menyadari bahwa ada risiko yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan anonim atau yang tidak jelas siapa pemiliknya. Sehingga Indonesia menjadikan transparansi perusahaan sebagai prioritas,” ungkap Eddy.

Selanjutnya, Indonesia telah secara signifikan membarui aturan-aturan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Indonesia pun telah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023 lalu.

Langkah Indonesia lainnya, tambah Eddy, adalah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai landasan penegakkan anti korupsi. Ia menjelaskan kalau KPK telah menorehkan catatan positif dalam hal penuntutan dan pemulihan aset.

“Selain KPK, kami juga menguatkan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi dan kasus keuangan lainnya,” ujar lulusan ilmu hukum UGM ini. Wamen Eddy mengungkapkan bahwa kejahatan di bidang keuangan marak terjadi antar negara. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum lintas negara menjadi keharusan. Beberapa bentuk kerja sama lintas negara adalah bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset. Dalam level internasional, Eddy menekankan pentingnya dialog dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan untuk membangun jaringan relasi serta keterampilan praktis.

“Jika penjahat melakukan kejahatan karena ada perbedaan hukum antar negara, maka kita harmoniskan hukum kita. Jika mereka memanfaatkan kurangnya komunikasi antar negara, maka kita bangun komunikasi secara langsung. Dan jika ada kapasitas SDM yang masih kurang, kita saling melatih dan mendukung satu sama lain,” katanya.

Eddy mengatakan Indonesia menantikan kemitraan dengan Rusia di bidang hukum untuk mengkokohkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. Ia berharap di masa depan Indonesia bisa berinvestasi di Rusia, maupun sebaliknya, dengan adanya perlindungan hukum yang pasti.

“Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita, dan juga tentunya untuk ekonomi global,” tutup Eddy.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung penuh langkah Kementerian Hukum RI dalam memperkuat sistem hukum untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan transparan.

“Di Kalimantan Selatan, kami berkomitmen menjalankan kebijakan pusat, seperti pendaftaran pemilik manfaat korporasi dan penerapan KUHP baru, khususnya terkait tanggung jawab korporasi. Melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas SDM, kami siap menjadi bagian dari upaya menciptakan investasi yang bersih dan berkelanjutan di wilayah,” ucapnya.

Kanwil Kemenkum Kalsel Tingkatkan Koordinasi Strategis Dengan BPHN Demi Akselerasi Target Kinerja 2025



Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk memperkuat pencapaian target kinerja di tahun 2025. Sebagai langkah konkret, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton E. Wardhana, melaksanakan koordinasi langsung ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025 siang tersebut menjadi forum penting dalam membahas sejumlah strategi percepatan, sinkronisasi program, serta solusi terhadap berbagai tantangan implementasi program BPHN di Kalimantan Selatan.

Soroti Penguatan Dasar Hukum dan Optimalisasi SDM

Dalam diskusi, Kepala Kanwil menyampaikan urgensi penguatan regulasi terkait Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan, dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selama ini, pelaksanaan program tersebut hanya mengacu pada Surat Edaran Kepala BPHN dan pedoman teknis.

“Kami mendorong agar program ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat, seperti dalam bentuk Permenkum atau kolaborasi dengan Permendes,” ujar Nuryanti.

Selain itu, Kanwil Kalsel mengusulkan penambahan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) seperti Penyuluh Hukum dan Pustakawan melalui mekanisme CPNS atau perpindahan jabatan, mengingat kebutuhan mendesak di daerah.

Rencana Strategis Penguatan Program Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Dalam koordinasi ini juga dibahas perlunya perencanaan yang lebih matang untuk program Penyuluhan Hukum Serentak, yang selama ini bersifat insidental. Penyesuaian jadwal dan kesiapan anggaran menjadi kunci agar pelaksanaan ke depan berjalan efektif.

Terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum, BPHN menegaskan bahwa penggunaan anggaran sudah dapat dilakukan sesuai kontrak dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), meskipun tidak mencakup usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Dalam hal ini, Kanwil tetap dapat melakukan pengawasan dengan maksimal meski anggaran terbatas.

Hal menarik lainnya ialah usulan untuk memperkuat pengawasan kualitas layanan bantuan hukum melalui link kuesioner, serta zonasi OBH yang dituangkan dalam SK Kepala Kantor Wilayah.

Peran Kepala Desa dan Lurah Butuh Dukungan Pusat

Masih minimnya keterlibatan Kepala Desa dan Lurah dalam mendukung program seperti Peacemaker Justice Award (PJA), Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak), dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) juga menjadi perhatian. Untuk itu, Kanwil mendorong adanya inisiasi MoU lintas kementerian atau surat edaran Menteri Hukum kepada para gubernur agar dapat memaksimalkan keterlibatan pemerintah daerah.

Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan program hukum karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, Kanwil akan mengintensifkan sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk memperkuat pendampingan di tingkat desa.

Penutup: Perluas Peran Penyuluh, Perkuat Arah Kebijakan

Di akhir sesi, disampaikan pula perlunya Surat Keputusan Kakanwil untuk mengatur dan memaksimalkan peran JFT Penyuluh Hukum agar lebih fokus pada tugas dan fungsinya, terutama dalam mendukung pelaksanaan program hukum di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini berlangsung lancar dan menjadi momen penting bagi Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BPHN dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci sukses dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan terlindungi secara menyeluruh,” pungkas Nuryanti.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Peluncuran Buku Ekonomi Kreatif Dalam Acara “Maramu Kisah 2025”



Banjarmasin, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) menghadiri kegiatan Maramu Kisah Tahun 2025 yang mengangkat tema peluncuran buku “Perjalanan Ekonomi Kreatif dari Perspektif Hexa Helix Kota Banjarmasin” pada Jum'at (16/05). Acara ini berlangsung di Banjarmasin Creative Hub dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, komunitas, hingga pelaku kreatif lokal.

Acara diawali dengan sambutan selamat datang yang diiringi alunan musik tradisional panting, menciptakan suasana hangat dan kental dengan nuansa budaya Banjar. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin, Farid Fathurrahman, membuka sesi dengan pemaparan perkembangan ekosistem hexa helix yang menjadi landasan kerja sama antar unsur dalam mendorong kemajuan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin.

Plt. Kadisbudporapar Kota Banjarmasin, Fitriah, menyampaikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap ekosistem kreatif dan pentingnya perlindungan atas karya-karya lokal. Acara peluncuran buku dikemas secara atraktif melalui tari solo, pemutaran video pembuka, prosesi launching, hingga testimoni dari para kontributor buku.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel kepada Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin. Dua karya yang didaftarkan adalah buku “Perjalanan Ekonomi Kreatif dari Perspektif Hexa Helix Kota Banjarmasin” dan “Rekam Jejak Indonesia Creative Cities Festival Banjarmasin 2023 (ICCF 2023)”. Langkah ini merupakan bentuk nyata perlindungan hukum atas kekayaan intelektual karya anak daerah.

Walikota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, turut memberikan sambutan resmi yang disambut prosesi alat musik tradisional ontong-ontong. Ia juga mengunjungi stan Kisah Banjarmasin yang menampilkan pameran foto dan lukisan perjalanan kota dari sudut pandang seniman lokal.

Sebagai penutup, pengunjung disuguhkan hiburan Banjarbakula dan pertunjukan malam “Bilik Bersenyawa Show” yang menampilkan kolaborasi seni dari berbagai komunitas kreatif.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam acara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi kekayaan intelektual sekaligus mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Kurang dari 10 Menit, Kemenkum Kalsel Dampingi Pemda Balangan Catat 200 Hak Cipta Inovasi Menuju Kompetisi Innovation Government Award



Banjarmasin, KI_Info - Pada Sabtu, 17 Mei 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Pendampingan Teknis Pencatatan Hak Cipta dalam rangka Pemenuhan Data Dukung Inovasi Daerah Kabupaten Balangan di Hotel Aria Barito, Banjarmasin.

Kegiatan ini dipandu oleh narasumber dari Ketua Tim Kerja Fasilitasi Layanan KI, Eka Shanty Maulina dan Analis KI Ahli Muda M. Aji Rifani, bersama tim Helpdesk KI, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis mengenai proses pencatatan hak cipta bagi pemangku kepentingan daerah khususnya 200 Inovasi yang akan dicatatkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Acara dibuka dengan paparan Eka Shanty Maulina tentang alur pencatatan hak cipta Inovasi. Ia menekankan bahwa layanan pendaftaran telah dioptimalkan sehingga proses input data—termasuk unggah dokumen pendukung dan deskripsi karya—dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit sebagai bentuk layanan prima. Selanjutnya, M. Aji Rifani memandu peserta melakukan simulasi registrasi secara langsung, mempraktikkan cara login, pengisian metadata karya, dan verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pada sesi diskusi, Helpdesk KI aktif menjawab berbagai pertanyaan teknis, mulai dari format dokumen yang dibutuhkan hingga tips penyusunan uraian inovasi. Diharapkan dengan bekal pengetahuan ini, pelaku usaha, instansi, dan masyarakat Kabupaten Balangan dapat segera mengamankan hak cipta inovasinya, serta mendukung langkah Pemerintah Daerah meraih Innovative Government Award (IGA) 2025.



Dialog Menteri Hukum Dengan Diaspora Saint Petersburg: Belajar, Kembali dan Bangun Negeri



Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pada Jum'at, 16 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO).

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara. "Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa" ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. "Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan".

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah, Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 nya di usia 26 tahun.

Teguh mengungkapkan komitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan proyek industri antara Indonesia dan Rusia. "Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan menyerap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya" katanya.

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka, jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Tentu kemampuannya dibutuhkan untuk bangsa.

Dalam pertemuan diaspora tersebut, hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Svetlana mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati oleh mahasiswa-mahasiswa di Rusia.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkum Komjen (Pol) Nico Afinta dan dua Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana dan Adam Muhammad.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik dialog langsung Menteri Hukum RI dengan diaspora Indonesia di Saint Petersburg.

"Ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam merangkul potensi putra-putri bangsa yang berada di luar negeri. Saya percaya bahwa membangun negeri tidak hanya dimulai dari dalam, tetapi juga melalui kontribusi warga negara yang menimba ilmu dan pengalaman di luar negeri. Dukungan penuh kepada mereka, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, adalah langkah strategis untuk memastikan transfer pengetahuan, teknologi, dan semangat kebangsaan ketika mereka kembali ke tanah air," ucap Kakanwil.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)